



News Title : Perkuat Ekosistem, Bappebti Rancang Permendag Pasar Lelang Komoditas

Media Name : kumparan.com

Journalist : -

Publish Date : 10 October 2023

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Heryono Hadi Prasetyo (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Bappebti)

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Bisnis

Topic : Kolaborasi Pengembangan Ekosistem PLK

Perkuat Ekosistem, Bappebti Rancang Permendag Pasar Lelang Komoditas

10 Oktober 2023 11:21 • waktu baca 3 menit



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Didid Noordiatmoko, Ketua Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). (Foto: Didi, Dep. Dag. Kemendag)

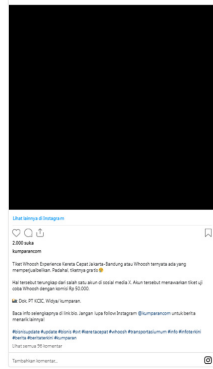
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, mengajuk penentah daerah dan Kementerian Perdagangan terkait untuk mempercepat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem pasar **lelang** komoditas (PLK).

Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi terwujudnya PLK sebagai salah satu instrumen perdagangan berjangka komoditas, yang akan mengikat wilayah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dibacakan Didid saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema "Percepatan Pengaturan Kebijakan Pasar Lelang Komoditas di Indonesia" yang diselenggarakan di Bali, Jumat, (6/10).

Acara dihadiri perwakilan Dinas Provinsi yang membekali perdagangan di antaranya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jambi, Sulawesi Utara, Bali, dan Bangka Belitung. Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari Bappebti, penyelenggara PLK dan lembaga mitra.

"Salah satu indikator yang memengaruhi pengembangan dan pematangan PLK adalah pengisian tetapan regulasi. Ke depan, instrumen PLK sangat dibutuhkan untuk mendapatkan harga yang adil dan transparan bagi petani, nelayan, peternak dan masyarakat kecil serta membebaskan industri di dalam negeri. Untuk itu, perlu dipikirkan mekanisme perdagangan berbasis kompetensi serta memberikan perlindungan masyarakat," kata Didid.



Adanya Peraturan Presiden No 73 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam melakukan pengisian kebijakan dan menjadi dasar pengembangan PLK.



"Kementerian Perdagangan diamanatkan untuk menyusun peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Permendag akan mengatur Norma Standar Prosedur Teknis (NSPTK) dan instrumen teknis implementasi PLK, sebagaimana tertuang dalam Perpres tersebut," katanya.



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Foto: Ditmas Kemendag

Didid menerangkan, komoditas Indonesia sampai saat ini masih belum menjadi 'tuan' di negeri sendiri. Harga belum berubah pada nelayan, petani, peternak yang merupakan penghasil komoditas. Oleh karena itu, Bappebti harus seimbang dalam mengatur petani, nelayan, peternak, masyarakat kecil serta pelaku industri.

"Dengan semangat itu Bappebti berusaha melakukan percepatan penyusunan Rancangan Permendag PLK agar instrumen ini berkontribusi lebih nyata dalam rantai perdagangan komoditas di Indonesia. Namun, upaya tersebut tidak akan terwujud tanpa kolaborasi dan peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur dan menjaga ekosistem PLK dan sistem real gudang (SRG). Terwujudnya PLK juga tidak cukup, harus berdampak lebih baik pada kesejahteraan masyarakat," kata Didid.

Beberapa insi strategi substansi Rancangan Permendag PLK, antara lain jenis PLK, pengaturan mekanisme pembinaan/pengembangan PLK, kelembagaan, peningkatan leviateng pembinaan/pengembangan antara pemerintah pusat dan daerah, sinergitas kebijakan/ program antara pemerintah pusat dan daerah,